

Judul : DPR Anggarkan Kunjungan Luar Negeri Rp 343,5 Miliar
Tanggal : Rabu, 30 Agustus 2017
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

DPR ANGGARKAN KUNJUNGAN LUAR NEGERI Rp 343,5 MILIAR

Total anggaran kunjungan ke luar negeri naik 70 persen.

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat berencana menaikkan anggaran kunjungan kerja luar negeri mereka dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 343,5 miliar—naik sekitar Rp 141,8 miliar atau 70 persen dari anggaran tahun ini sebesar Rp 201,7 miliar.

Berdasarkan dokumen tentang tambahan dalam pagu anggaran dan penyelesaian rencana kerja DPR tahun 2018 tertulis penambahan anggaran perjalanan Dewan ke luar negeri. Untuk perjalanan dinas luar negeri nilainya Rp 246,6 miliar dan program penguatan kelembagaan dalam bentuk pelaksanaan kerja sama internasional sebesar Rp 96,9 miliar.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Agung Budi Santoso, menuturkan, kenaikan nilai anggaran itu merupakan akumulasi dari dana kunjungan kerja pada

2016 yang sempat dipotong karena ada moratorium kunjungan Dewan ke luar negeri. "Mengembalikan utang kemarin. Yang dulu tidak boleh, sekarang boleh," ujarnya di DPR kemarin. Kenaikan anggaran itu juga untuk menyesuaikan dengan biaya hotel dan tiket pesawat yang naik.

Ade Komaruddin memang sempat melakukan moratorium kunjungan kerja Dewan ke luar negeri saat dia menjabat Ketua DPR untuk menggantikan Setya Novanto tahun lalu. Alasannya, selain untuk penghematan, moratorium untuk meningkatkan kinerja legislasi anggota Dewan. Anggaran yang semula Rp 360 miliar terpengang menjadi Rp 139 miliar. Kinerja legislasi Dewan juga melonjak. Pada tahun itu, sepuluh undang-undang berhasil disahkan, padahal satu tahun sebelumnya Dewan hanya berhasil mengesahkan tiga undang-undang. Namun hal itu tidak berlangsung lama. Pada akhir

Anggaran ke Luar Negeri Vs Prestasi

Hampir setiap tahun nilai anggaran kunjungan kerja luar negeri Dewan Perwakilan Rakyat naik. Para anggota Dewan kerap berdalih butuh sering ke luar negeri untuk studi banding atau mempelajari aturan negara lain guna memudahkan pembahasan rancangan undang-undang yang sedang digodok di Senayan. Meski demikian, kinerja legislasi Dewan tidak kunjung membaik.

November 2016, Ade terpentil. Setya Novanto kembali menduduki kursi Ketua DPR dan selanjutnya mencabut moratorium kunjungan Dewan ke luar negeri.

Agung berdalih bahwa kunjungan ke luar negeri penting dilakukan oleh anggota Dewan sebagai salah satu sarana mereka memperoleh masukan dalam

pembahasan rancangan undang-undang. "Dalam membuat undang-undang, perlu kunjungan ke luar negeri," kata dia. "Itu kebutuhan dan merupakan hasil rapat dengan alat kelengkapan Dewan serta komisi."

Politikus Partai Amanat Nasional, Ahmad Bakri, yang juga mantan anggota BURT, setuju atas kenaikan

2015
Total anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri: **Rp 353,95 miliar**
Hasil legislasi: dari 37 RUU Prioritas, hanya 3 yang berhasil disahkan

2014
Total anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri: **Rp 147,9 miliar**
Hasil legislasi: dari 68 RUU Prioritas, hanya 3 yang berhasil disahkan

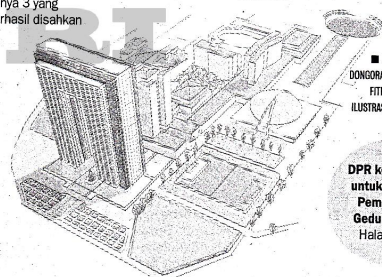
2013
Total anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri: **Rp 142,4 miliar**
Hasil legislasi: dari 75 RUU Prioritas, hanya 7 yang berhasil disahkan

2016
Total anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri: **Rp 360 miliar**
Dalam perkembangan, Ketua DPR Ade Komaruddin memotongnya menjadi Rp 139 miliar.

2017
Total anggaran belanja perjalanan dinas luar negeri: **Rp 201,7 miliar**
Hasil legislasi: dari 50 RUU Prioritas, hanya 4 yang berhasil disahkan (per Juli)

2018
Rencana total anggaran belanja perjalanan luar negeri: **Rp 343,5 miliar**
Terdiri atas:

- 246,6 miliar (perjalanan dinas luar negeri)
- Rp 96,9 miliar (anggaran program penguatan DPR pada subprogram pelaksanaan tugas DPR dalam kerja sama internasional)



■ NASKAH: HUSSEIN ABRI
DONGORAN | AGUNG S | SUMBER:
FITRA | RINCIAN APBN 2017
ILUSTRASI: TEMPO/INDRA FAUZI

**DPR ke Jerman
untuk Pelajari
Pembuatan
Gedung Baru**
Halaman 9

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran, Yenny Sucipto, mengatakan kenaikan anggaran kunjungan kerja ini sangat janggal karena mendekati pemilihan umum legislatif. "Mereka butuh tambahan untuk kampanye, dari dana kunjungan kerja yang lumayan," ujarnya.

● HUSSEIN ABRI DONGORAN | AGUNG S